

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Adnan, Hasantoha. 2008. *Belajar dari Bungo: Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*. Bogor: Center for Internasional Forestry Research
- Anitasari, Rahayu Fery. 2008. *Tesis Program Magister Kenotariatan: Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang*. Semarang: UNDIP
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- B, Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chomzah, H. Ali Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan Seri III dan IV*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 1986. *Standar Perencanaan Irigasi: Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi*. Bandung: CV Galang Persada
- Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetijarto. 1997. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria (1960)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB

- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Muchsin, H dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdukadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Minto. 2007. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____. dan Siti Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press
- Soemardjono, Maria S. W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- _____. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soeroso, Santoso. 2005. *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sudadi, Untung. 2002. *Produksi Padi dan Pemanasan Global: Tanah Sawah Bukan Sumber Utama Emisi Metan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Yusriyadi. 2010. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/ 1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1984 Nomor 590/11108/SJ tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Sawah Irigasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 perihal Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Dati I dan Kabupaten/Kota Dati II

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 perihal Pencegahan Konversi Tanah Sawah Beririgasi Teknis Menjadi Tanah Kering

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam

Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian di Propinsi Jawa Tengah.

Surat Edaran Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/3563/33/2008 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 248 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Wonogiri